

Menakar Kualitas Pengelolaan Dana Haji

Pada akhir Juni 2022, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini adalah kali keempat BPKH mendapatkan opini WTP secara berturut-turut. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa pengelolaan keuangan haji telah berada pada jalur yang tepat dan telah memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas yang sangat diperlukan dalam meyakinkan publik bahwa dana haji telah dikelola dengan amanah dan penuh tanggung jawab.

Jika melihat kinerja keuangan yang ada, data menunjukkan bahwa saldo dana haji mengalami peningkatan sebesar 9,58 persen, dari Rp 144,91 triliun pada 2020 menjadi Rp 158,79 triliun pada 2021. Kenaikan ini melebihi target yang ditetapkan sebelumnya, yaitu sebesar Rp 155,92 triliun sehingga realisasi yang ada pada dasarnya mencapai angka 101,84 persen dari target yang telah ditetapkan. Hal ini juga berimbas pada kenaikan total aset BPKH yang mencapai angka 10,17 persen pada tahun 2021. Data menunjukkan bahwa total aset BPKH berada pada angka Rp 160,60 triliun pada tahun 2021, naik dari Rp 145,77 triliun pada tahun 2020.

Dari sisi penempatan dan investasi dana haji, BPKH juga mampu meningkatkan proporsi investasi pada instrumen-instrumen ekonomi dan keuangan syariah yang memberi return lebih baik. Pada tahun 2021, proporsi penempatan dana di perbankan syariah mencapai angka 28,74 persen, turun dari angka 31,28 persen pada tahun 2020. Sementara itu, proporsi investasi pada tahun 2021 mencapai angka 71,26 persen, naik dari angka 68,72 persen pada tahun sebelumnya. Dengan kata lain, BPKH mampu mampu memperkecil proporsi penempatan dana pada level di bawah 30 persen, dan memperbesar porsi investasi hingga melebihi angka 70 persen.

Kebijakan BPKH untuk menaikkan proporsi investasi ini merupakan pilihan yang sangat baik dan strategis.

Kenaikan proporsi investasi ini tentu berdampak pada perolehan nilai manfaat yang didapat BPKH. Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan BPKH, tercatat perolehan nilai manfaat pengelolaan keuangan haji pada 2021 mencapai angka Rp 10,50 triliun, naik 41,32 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai angka Rp 7,43 triliun.

Kenaikan nilai manfaat ini bersumber dari nilai manfaat pada penempatan dana haji sebesar Rp 1,85 triliun dan nilai manfaat investasi sebesar Rp 8,14 triliun. Sisanya berasal dari sumber-sumber lainnya yang mencapai angka Rp 500 miliar. Secara keseluruhan, kenaikan nilai manfaat ini melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp 9,25 triliun. Imbasnya, besaran nilai manfaat yang disalurkan pada rekening virtual para calon jemaah haji juga mengalami peningkatan sebesar 25 persen, dari Rp 2 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 2,5 triliun pada 2021.

Adapun dari sisi rasio keuangan, BPKH juga berhasil menjaga rasio likuiditas wajib, yang sesuai peraturan perundang-undangan, BPKH wajib menjaga likuiditas ini senilai dua kali biaya penyelenggaraan ibadah haji. Pada 2021, rasio likuiditas wajib ini dapat dijaga di level 2,97 kali biaya penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu, rasio solvabilitas dapat dijaga pada level di bawah 100 persen. Rasio solvabilitas BPKH pada tahun 2021 mencapai angka 88,86 persen.

Nilai rasio likuiditas wajib dan

rasio solvabilitas ini pada dasarnya menunjukkan tingkat keamanan dana haji. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dana haji yang dikelola oleh BPKH sesungguhnya berada dalam kondisi yang aman. Hal ini dapat menjadi jawaban atas keraguan publik terhadap keamanan dana haji yang telah disertorkan para calon jemaah haji.

Sementara itu, dari sisi beban biaya operasional BPKH, meski data menunjukkan adanya peningkatan beban operasional dari Rp 159,38 miliar pada 2020 menjadi Rp 234,01 miliar pada 2021, nilai *cost to income ratio* (CIR)-nya tetap berada di bawah ambang batas 5 persen, yaitu sebesar 2,23 persen. Ini menunjukkan kemampuan pengelolaan keuangan haji yang sangat efisien.

Selain mengelola dana tunggu haji yang bersumber dari para calon jemaah haji, BPKH juga mengelola Dana Abadi Umat (DAU). Jumlah DAU ini juga meningkat dari Rp 3,68 triliun pada tahun 2020 menjadi



FOTO DOK. BPKH

Raih Opini WTP 4 kali berturut-turut. Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPKH Tahun 2021 dari Ketua BPK sekaligus Plt Anggota V/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Isma Yatun.

pada 2020 menjadi 270,9 ribu orang pada 2021. Meski turun, akumulasi total calon jemaah haji yang masuk daftar tunggu (*waiting list*) naik dari 4,99 juta orang pada 2020 menjadi 5,21 juta orang pada 2021. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bersama seluruh negara-negara Islam untuk bersama-sama memikirkan upaya memperpendek masa tunggu ibadah haji ini.

Selanjutnya, dari sisi makro, pengeluaran dana haji ini memiliki sejumlah implikasi. Pertama, dana haji yang diinvestasikan melalui instrumen SBSN/sukuk negara, selain memberikan nilai manfaat yang dapat digunakan untuk kepentingan jemaah haji, juga dapat membantu program-program strategis pembangunan nasional. Dana haji dapat membantu memperbesar ruang fiskal yang diperlukan untuk membangun bangsa ini. Diharapkan hal ini

berdampak positif pada penguatan perdamaian dan pengembangan ekonomi nasional.

Kedua, dari perspektif pembangunan ekosistem ekonomi syariah, pengelolaan dana haji ini dapat berperan dalam mendorong pengembangan sisi suplai per-ekonomian. Keberadaan Bank Muamalat yang saat ini berada di bawah kepemilikan BPKH sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP), harus dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memperkuat ekosistem pengelolaan haji dan umrah yang terintegrasi dari hulu ke hilir sehingga dapat memberikan *multiplier effect* yang signifikan terhadap kondisi perekonomian. Dengan demikian, kontribusi dana haji terhadap pembangunan ekonomi syariah bisa semakin besar.

Ketiga, penyaluran nilai manfaat DAU dalam program-program kemaslahatan dapat menjadi jalan untuk membantu penguatan akses perdamaian dan pengembangan ekonomi sosial keuamanan, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pesantren dan dakwah, serta dapat juga membantu upaya penurunan angka kemiskinan. Tinggal desain program kemaslahatan ini perlu didorong lebih variatif dan inovatif sehingga ruang-ruang pemberdayaan masyarakat bisa ditingkatkan. Program kemaslahatan ini juga telah berkontribusi dalam upaya mereduksi dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2021.

Dengan kondisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan BPKH sangat baik, transparan, dan akuntabel. Ini menjadi bekal yang sangat baik dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPKH. [IRFAN SYAUQI BEIK/EKONOMI SYARIAH FEM IPB UNIVERSITY]

Situs web BPKH: www.bpkh.go.id

LAPORAN KEUANGAN BPKH TAHUN 2021



NERACA

(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 2021 (Audited)	31 Des 2020 (Audited)
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	9.246.996.255,00	17.951.687.031,00
Piutang	4.502.635.014,00	3.760.391.694,00
Persediaan	338.102.353,00	335.705.421,00
Beban dibayar dimuka	12.246.591.242,00	11.596.596.713,00
Pendapatan yang masih harus diterima	1.725.850.809.078,00	718.547.428.203,00
Uang Muka Investasi	1.000.000.000.000,00	0,00
Penempatan pada bank	45.636.507.916.615,00	45.331.357.490.577,00
Investasi jangka pendek	7.573.901.000.000,00	8.861.980.089.784,00
Jumlah Aset Lancar	55.962.594.050.557,00	54.945.529.389.423,00
Aset Tidak Lancar		
Investasi jangka panjang	104.576.358.276.532,00	90.713.181.900.096,00
Aset tetap - bersih	6.624.609.770,00	79.614.515.081,00
Aset tak berwujud - bersih	22.328.361.609,00	5.400.326.670,00
Kas yang dibatasi penggunaannya	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
Aset lain-lain	3.034.335.246,00	3.034.335.246,00
Jumlah Aset Tidak Lancar	104.633.345.583.157,00	90.826.231.077.093,00
TOTAL ASET	160.595.939.633.714,00	145.771.760.466.516,00
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang beban	28.479.271.292,00	15.906.723.003,00
Utang Jemaah tunda	9.180.651.053.705,00	8.661.589.046.158,00
Utang pajak	53.419.425.316,00	699.633.217,00
Utang lain-Lain	129.350.124.594,00	126.911.329.168,00
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	9.391.899.874.907,00	8.805.106.731.546,00
Liabilitas Jangka Panjang		
Dana titipan Jemaah	133.254.547.989.632,00	125.900.381.376.469,00
Pendapatan nilai manfaat yang ditangguhkan	238.078.541.630,00	238.078.541.630,00
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	133.492.626.531.262,00	126.138.459.918.099,00
JUMLAH LIABILITAS	142.884.526.406.169,00	134.943.566.649.645,00
ASET NETO		
Tanpa Pembatasan	488.770.622.721,00	1.077.452.330.865,00
Dengan Pembatasan	17.222.642.604.824,00	9.750.741.486.006,00
JUMLAH ASET NETO	17.711.413.227.545,00	10.828.193.816.871,00
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO	160.595.939.633.714,00	145.771.760.466.516,00

LAPORAN OPERASIONAL

(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 2021 (Audited)	31 Des 2020 (Audited)
Pendapatan setoran Jemaah berangkat	0,00	0,00
Beban BPIH ke Kementerian Agama	0,00	(17.945.975.432,00)
Surplus/(Defisit) BPIH	0,00	(17.945.975.432,00)
Pendapatan nilai manfaat Dana PIH	9.764.217.501.076,00	7.204.350.191.164,00
Penyaluran untuk rekening virtual	(2.500.000.000.000,00)	(2.000.000.000.000,00)
Beban operasional BPKH	(234.005.267.977,00)	(159.387.674.770,00)
Beban hibah	(64.956.702.284,00)	0,00
Surplus/(Defisit) Dana PIH	6.965.255.530.815,00	5.044.962.516.394,00
Pendapatan nilai manfaat Dana	237.615.583.591,00	229.223.554.228,00
Abadi Umat (DAU)		
Penyaluran program kemaslahatan	(189.446.292.902,00)	(131.643.935.222,00)
Surplus/(Defisit) DAU	48.169.290.689,00	97.579.619.006,00
Akumulasi Surplus/(Defisit)	7.013.424.821.504,00	5.124.596.159.968,00
Pendapatan Hibah	236.935.303.186,00	0,00
Pendapatan di Entitas Asosiasi	7.003.271.510,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	499.554.467.599,00	0,00
Total Surplus/(Defisit) Sebelum	7.756.917.863.799,00	5.124.596.159.968,00
Pajak Penghasilan		
Beban Pajak Penghasilan	(52.125.766.660,00)	0,00
Penghasilan/(Beban) komprehensif lain	21.676.194.301,00	655.514.263.076,00
Total Surplus Komprehensif	7.726.468.291.440,00	5.780.110.423.044,00

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 2021 (Audited)	31 Des 2020 (Audited)

<tbl_r cells="3"